

PERKOSAAN DALAM PERNIKAHAN

Valentina Widyastuti

Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM

Akhir-akhir ini kita semakin terbiasa dengan berbagai kasus hukum selebritis, terutama yang berkaitan dengan masalah kekerasan suami terhadap istri. Dalam kasus-kasus itu, istri menggugat suami mereka ke pengadilan atas tuduhan penganiayaan. Penganiayaan yang diajukan biasanya berupa penganiayaan fisik dengan akibat yang dapat terlihat jelas oleh siapa pun, seperti memar-memar pada bagian tubuh tertentu. Korban atau sang istri juga dengan serta-merta dan kesadaran tinggi segera memfoto luka di tubuh mereka dan melakukan visum, sebagai bukti di pengadilan.

Walaupun kasus-kasus penganiayaan fisik yang diajukan ke pengadilan masih dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan kasus serupa yang tidak diajukan ke pengadilan, ini telah menunjukkan meningkatnya kesadaran perempuan Indonesia mengenai hak-haknya dalam mewujudkan kesederajatan dengan laki-laki. Namun demikian, dengan semakin seringnya berita di media massa yang mengupas kasus tersebut, kiranya dapat mendorong mereka yang mempunyai kasus serupa tetapi belum berani mengajukannya ke pengadilan.

Banyaknya istri yang tidak berani mengajukan tindak penganiayaan suaminya ke pengadilan karena masih kentalnya pemikiran populer dan tradisional yang menomorduakan perempuan. Pemikiran seperti itu mengakibatkan istri merasa malu

untuk melaporkan kekerasan yang dilakukan suaminya karena sama dengan membuka aib keluarga. Tidak hanya itu, mereka akan mendapat image negatif dari masyarakat yang masih menganggap istri harus selalu patuh pada suami dan menuruti segala kemauan suami. Jika jadinya begitu, lalu dimana hak istri sebagai manusia yang memiliki kehendak?

Kondisi sebagian besar masyarakat kita, termasuk perempuan itu sendiri yang masih berpikir pengajuan kasus kekerasan suami ke pengadilan merupakan hal yang tabu dapat diubah melalui kinerja media massa melalui berbagai artikelnya, termasuk tulisan ini. Media massa diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif, tidak menyudutkan perempuan dalam kasus serupa.

Kasus-kasus kekerasan suami terhadap istri sebenarnya

tidak hanya meliputi penganiayaan fisik, tetapi juga meliputi rohani, bahkan ekonomi. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual suami terhadap istri yang belum banyak mendapat perhatian dari ilmuwan-ilmuwan sosial, praktisi-praktisi, sistem peradilan, dan bahkan oleh perempuan itu sendiri adalah *marital rape* atau pemerkosaan dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan para perempuan dan masyarakat luas yang belum paham mengenai *marital rape*.

Marital rape atau perkosaan dalam pernikahan adalah seluruh hubungan seksual yang tidak diinginkan, baik secara vagina, anus, maupun mulut, yang dilakukan dengan kekerasan terhadap istri oleh suami. Sebagian besar peneliti menyatakan bahwa *marital rape* dilakukan oleh pasangan yang secara legal telah menikah ataupun bercerai.

Diana Russell (1990) mengatakan bahwa dari hasil wawancaranya dengan 930 wanita secara acak di San Fransisco menemukan bahwa *marital rape* adalah masalah serius yang dihadapi jutaan wanita setiap tahunnya. Bahkan, ditemukan bahwa $\pm 25\%$ dari seluruh masalah pemerkosaan adalah *marital rape*. Para peneliti memastikan bahwa antara 10% dan 14% dari wanita yang telah menikah pernah mengalami *marital rape*. Penelitian menemukan bahwa antara 1/3 dan 1/2 wanita pernah diperkosa oleh pasangan mereka minimal 1 kali.

Masalah *marital rape* belum juga populer hingga saat ini. Hal ini disebabkan, telah berabad-abad lamanya, sehingga telah mengakar pemikiran bahwa dapat diterima bagi pria untuk memaksa istrinya melakukan hubungan seksual yang bertentangan dengan keinginannya. Hal ini seakan-akan, sejarah memberikan "hak untuk memperkosa" bagi pria terhadap istrinya. Selama ini telah muncul tanggapan bahwa istri tidak mempunyai hak untuk menolak berhubungan seksual dengan suaminya.

Serupa dengan kasus penganiayaan fisik yang telah dibahas di awal bahwa istri yang mengalami *marital rape* akan ragu-ragu untuk melaporkannya. Hal ini dikarenakan masalah kesetiaan dalam keluarga, ketakutan akan pemerkosanya (suaminya), ketidakmampuan untuk meninggalkan hubungan, atau mereka malah tidak tahu bahwa *marital rape* ini melanggar hukum. Selain itu, pemikiran kolot masyarakat telah membuat wanita merasa tidak nyaman mendiskusikan kekerasan seksual yang dialaminya bersama pasangannya.

Bahkan, pemikiran kolot masyarakat telah mampu mengakar-kan keyakinan pada perempuan bahwa pemaksaan seksual di dalam pernikahan adalah bukan pemerkosaan, melainkan memang tugas seorang istri. Tugas istri mematuhi suami dan dosa bagi istri jika

menolak keinginan suami untuk melakukan hubungan seksual. Yang jelas itu adalah anggapan yang salah. Mereka memandang perkosaan oleh orang yang tidak dikenal, barulah bisa dianggap perkosaan yang sebenarnya.

Masalah *marital rape* perlu disosialisasikan karena tidak hanya menyangkut usaha penyamaan kedudukan (hak berkehendak) istri dengan suami, tetapi juga memiliki efek medis dan psikologis. Efek fisik dari *marital rape* adalah luka di daerah vagina dan anus, muntah-muntah, otot-otot tegang. Efek lain dari *marital rape* dengan kekerasan. Secara seks, efek lain yaitu pelebaran vagina, infeksi vagina, tidak subur, dan efek transfer penyakit seks, termasuk HIV.

Efek psikologis dari *marital rape* adalah shock, ketegangan dan ketakutan, depresi, bunuh diri, stress traumatik yang berkepanjangan. Bahkan, dibanding dengan pemerkosaan oleh orang tak dikenal, *marital rape* menyebabkan depresi yang tingkatannya lebih tinggi. Efek jangka panjangnya, termasuk gangguan dalam makan, masalah tidur, depresi, dan masalah membangun kepercayaan dalam hubungan, dan meningkatkan perasaan yang negatif tentang mereka sendiri

Suami biasanya memperkosa istri ketika istri sedang tertidur, atau menggunakan kekerasan bersenjata untuk memaksa istri melakukan seks. Pria yang melakukan *marital rape* biasanya berpotensi untuk

melakukan pembunuhan.

Jadi, jelas bahwa *marital rape* merupakan masalah kekerasan yang serius terhadap perempuan dan membutuhkan perhatian banyak pihak. Penelitian memperlihatkan bahwa wanita yang diperkosa oleh suaminya tidak ingin mengalami pengalaman seksual lagi dan mengalami gangguan fisik maupun emosi. *Marital rape* lebih traumatik dari pada pemerkosaan oleh orang yang tak dikenal karena istri tinggal bersama pelaku dan mungkin akan mendapat teror yang terus-menerus, baik saat bangun maupun tidur.

Berdasar fakta yang serius itu, sejak tanggal 5 Juli 1993, *marital rape* menjadi suatu tindakan kejahatan di seluruh negara bagian AS. Ini berarti ada hak yang diberikan pada istri untuk membawa masalah *marital rape* ke pengadilan. Yang terpenting adalah janganlah orang berpikir bahwa istri adalah "barang" milik suami, bukan manusia yang memiliki hak untuk berkehendak.

Selain dibutuhkan kesadaran dari istri akan haknya, juga dibutuhkan sosialisasi hukum di Indonesia yang jelas mengenai masalah ini. Tidak hanya itu, kondisi masyarakat yang memahami benar kasus *marital rape* juga dibutuhkan, sehingga mampu membantu memecahkan masalah ini. Sebagai contoh polisi seharusnya merespon dengan baik laporan *marital rape*, yaitu melihat secara objektif fakta pemerkosaan istri dan bagaimana

bertanya secara sensitif kepada korban. Lebih efektif lagi jika dibentuk badan perlindungan perempuan yang profesional yang

mengkampanyekan anti-*marital rape*, melayani segi kesehatan dan hukum korban di pengadilan.